

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Minggu ke-4 Bulan Mei 2021 (tanggal 21 s.d. 27 Mei)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

RENCANA LANJUTAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK

Rais Agil Bahtiar
Peneliti Pertama/Administrasi Publik
rais.bahtiar@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Kebijakan pemerintah untuk menghapus sanksi administrasi perpajakan sebesar 200% dari Pajak Penghasilan wajib pajak peserta *Tax Amnesty 2016* menjadi jalan tengah untuk mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19. Opsi kebijakan yang kerap disebut sebagai *Sunset Policy* ini dianggap dapat dengan cepat membantu pemerintah untuk menambal celah defisit anggaran. Di sisi lain, terobosan ini juga bisa meringankan beban pengusaha yang masih berusaha pulih dari pandemi.

Melalui kebijakan *Sunset Policy* ini, pemerintah memberikan stimulus kepada wajib pajak peserta Tax Amnesty untuk kembali mengungkapkan hartanya yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Latar belakang dirumuskannya *Sunset Policy* ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya repatriasi harta atau aset dalam program Tax Amnesty 2016. Alasan lainnya adalah kesulitan pemerintah untuk menindaklanjuti data hasil kerja sama pertukaran informasi atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. AEOI merupakan pertukaran informasi yang melibatkan mekanisme transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak yang dilakukan secara massal oleh negara asal ke negara tempat wajib pajak.

Kesulitan tersebut tentu beralasan. Pada 2018 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total nilai data AEOI mencapai Rp2.742 triliun. Berdasarkan penelitian Ditjen Pajak Kemenkeu, terdapat selisih setara kas pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2018, dengan data AEOI senilai Rp670 triliun.

SUMBER

Bisnis Indonesia, 25 Mei 2021; cnnindonesia.com, 24 Mei 2021; kontan.co.id, 25 Mei 2021.